

Sosialisasi, Aktualisasi dan Evaluasi Program Rutilahu Di Kota Cirebon

Haniah^{1*}, Syaeful Bakhri²

¹Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

²IAIN Syekh Nurjati Cirebon

¹e-mail: haniah.heni@yahoo.co.id

²e-mail: sultan01aulia@yahoo.com

*Corresponding Author

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini masih belum selesai dan menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah di Indonesia. Jumlahnya kian meningkat setelah datangnya krisis ekonomi. Selain masalah layanan kesehatan, gizi anak, layanan pendidikan, rumah tidak layak huni juga menjadi masalah banyak masyarakat miskin. Oleh karenanya pemerintah melaksanakan program RS-Rutilahu (Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni) untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sekaligus mengetahui permasalahan yang ada dalam program RS-Rutilahu serta urutan prioritas masalahnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, permasalahan yang paling urgent adalah; Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka, transparan dan intensif dengan total nilai CARL sebesar 625. Kemudian disusul dengan Monev internal dan eksternal yang belum optimal dengan total nilai CARL sebesar 225. Dan yang ketiga Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang di siapkan dengan total nilai CARL sebesar 150.

Kata Kunci: Rutilahu; Evaluasi; Aktualisasi; Sosialisasi

ABSTRACT

Poverty is a problem that is still unfinished and is a big job for the Government in Indonesia. The number has increased after the economic crisis came. In addition to health services, child nutrition, education services, uninhabitable houses are also problems for many poor people. Therefore, the government implements the RS-Rutilahu (Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses) program to help the poor who do not yet have a decent house to live in. The purpose of this study is to identify and at the same time know the problems that exist in the RS-Rutilahu program and the order of priority of the problems. The results of this study indicate that the most urgent problems are; Communication between BKM and beneficiaries has not been open, transparent and intensive with a total CARL value of 625. Then followed by internal and external Monev which has not been optimal with a total CARL value of 225. And thirdly, the number of proposed beneficiaries is not proportional to the amount of the aid quota. prepared with a total CARL value of 150.

Keywords: Rutilahu, Evaluation; Actualization; Socialization

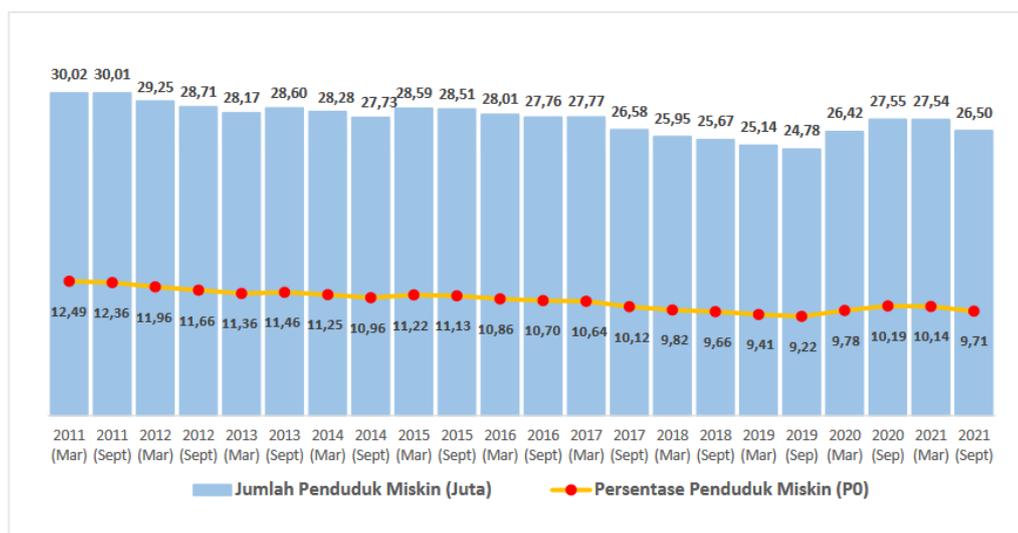
PENDAHULUAN

Dalam suatu Negara, kinerja pembangunannya dapat diukur melalui beberapa indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, persentase orang miskin, dan lain-lain. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan berdampak positif jika telah memenuhi berbagai standar ukur pembangunan (Jayadi, 2016).

Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi isu sentral bagi negara-negara berkembang. Pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bangsa adalah hilir tujuan suatu Negara. Meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan, ternyata angka kemiskinan dan garis kemiskinan masih juga signifikan. Terlebih pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia, tingkat resiliensi dari berbagai komoditi pun masih dan sedang bertahap kepada pemulihan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah social. Indonesia sebagai Negara berkembang yang masih berjuang dalam pengentasan kemiskinan yang dipengaruhi oleh dimensi sosial ekonomi terus melakukan upaya dalam penanganannya (Ningrum, 2017).

Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 26,50 juta orang. Apabila dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah tersebut menurun 1,04 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). BPS (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik dalam mencukupi kebutuhan dasar masakan dan bukan makanan yang diukur melalui pengeluaran. Suharto dalam (Udiati, 2020) mengidentifikasi kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2011 – September 2021

Kemiskinan di Indonesia secara umum dapat terpetakan secara teritorial, yakni kemiskinan yang ada di perkotaan dan pedesaan (M. Puspitasari, V. Nurmalasari, 2011). Di perkotaan, kemiskinan terkonsentrasi di kota-kota besar, karakteristiknya biasanya yang dekat dengan permukiman yang padat dan kumuh (Juanda, 2018). Sebagai salah satu kota metropolitan yang ada di Jawa Barat, Kota Cirebon juga menghadapi masalah kemiskinan tersebut (Bakhri et al., 2021).

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya rumah atau tempat tinggal yang layak huni menyebabkan keluarga miskin tidak dapat melakukan fungsi keluarga dengan baik. Sesuai dengan amarta UUD 1945 keluarga miskin berhak mendapatkan rumah layak huni dan bahwa orang miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab Negara. Pemerintah dan elemen masyarakat memiliki peran serius dalam menurunkan angka kemiskinan, salah satunya adalah dengan program RS-Rutilahu. Program Rutilahu tidak hanya sekedar pemberian bantuan, melainkan peran serta masyarakat dengan budaya gotong-royong, dan kesetiakawanan yang menjadi tujuan dari program Rutilahu (Udiati, 2020).

Kementrian Sosial RI melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal penduduk miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dinding dan fasilitas MCK (Susanto, 2019). Dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 20 Tahun 2017 mengenai RS-Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan dijelaskan bahwa Rutilahu adalah tempat tinggal/rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Program Rutilahu ini mulai berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Biaya pembangunan atau rehabilitasi Rutilahu menjadi layak huni bersumber dari APBN, APBD serta lembaga sosial yang sifatnya non-pemerintah seperti CSR (Udiati, 2020). Program perbaikan seperti ini juga dilakukan di beberapa Negara Asia lainnya, seperti China dan India. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam menyediakan rumah yang layak untuk dihuni dan terjangkau bagi masyarakat miskin dengan menggunakan kebijakan khusus seperti; penyediaan lahan dan sistem pembiayaan yang sesuai dan tepat sasaran (Cai, W., & Lu, 2015).

Total penerima bantuan program Rutilahu di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 670.685 penerima manfaat (Kemensos, 2021b). Penerima bantuan program RS-Rutilahu setiap tahunnya terus meningkat dan merata ke 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat program RS Rutilahu dibawah naungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) pada tahun 2021 dialokasikan kepada 958 penerima manfaat dan 115 penerima manfaat tersebut berasal dari Kabupaten Indramayu dengan nominal bantuan Rp 20 juta/penerima manfaat (Kemensos, 2021a).

Muh. Eko Darmayanto selaku Kabid Perumahan Disperkim Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa kegiatan Rutilahu TA 2021 mengusung tema “Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional” dimana target penerima adalah 31.500 rumah yang tersebar di Jawa Barat (Dea, 2021). Hingga tahun 2020, penerima manfaat program Rutilahu di Jawa Barat sebanyak 72.824 penerima manfaat (Kemensos, 2021b).

Program Rutilahu juga sudah menjangkau Kota Cirebon, meski pada awal program tersebut diluncurkan Kota Cirebon belum termasuk didalamnya. Mulai tahun 2018, program Rutilahu sampai di Kota Cirebon. Total penerima bantuan RS-Rutilahu Kota Cirebon sejak tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 1.067 penerima manfaat (Kemensos, 2021b). Sedangkan, pada tahun 2021 Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati mengungkapkan bahwa Kota Cirebon mendapat jatah 630 unit rumah yang siap untuk renovasi. Meski demikian masih terdapat 4900 unit rumah yang masih masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) (Dea, 2021).

Total penerima bantuan Rutilahu di Kota Cirebon yang tersebar dalam lima Kecamatan berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon sebanyak 2.940 penerima manfaat (DPRKP, 2022). Bantuan tersebut terdiri atas BSPS Reguler, BSPS Strategis dan Bantuan Gubernur yang berlangsung sejak tahun 2017.

Kemiskinan yang hingga kini masih menjadi problematika dan menjadi tanggung jawab Negara, menjadikan peran pemerintah sebagai *problem solver*. Ketidakmampuan penduduk miskin atas pemenuhan tempat tinggal yang layak huni menjadikan program RS-Rutilahu sebagai program yang dapat membantu masyarakat miskin di Indonesia. Kendati demikian, program ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada calon penerima manfaat, khususnya di Kota Cirebon. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan dan memberi arahan kepada calon penerima manfaat terkait program RS-Rutilahu dan prosesnya hingga program tersebut dapat dirasakan kepada calon penerima manfaat.

BAHAN DAN METODE

Partisipan yang menjadi sasaran adalah masyarakat atau penduduk miskin yang tinggal di Kota Cirebon. Kegiatan ini dilakukan selama Tahun 2021 mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan program Rutilahu di Kota Cirebon, yakni sebagai berikut:

1. Tahapan Sosialisasi

Tahapan ini bertujuan untuk menerangkan informasi kepada calon penerima manfaat atas bagaimana cara seperti apa program ini dapat membantu mereka. Pada tahap ini metode yang digunakan adalah datang secara langsung ke lapangan, dalam hal ini mendatangi setiap

kelurahan yang tersebar di lima Kecamatan yang ada di Kota Cirebon (Harjamukti, Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk dan Pekalipan).

Tahapan sosialisasi dilakukan dalam 3 tahapan, yakni sosialisasi awal program rutilahu, kemudian sosialisasi LPJ (laporan pertanggungjawaban) program rutilahu, dan sosialisasi pra konstruksi program rutilahu. Sosialisasi ini dilakukan di lima kecamatan yang ada di Kota Cirebon (Harjamukti, Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk dan Pekalipan).



Sumber: Data Primer, 2021.

Gambar 2. Sosialisasi Awal Program Rutilahu



Sumber: Data Primer, 2021.

Gambar 3. Sosialisasi LPJ Program Rutilahu



Sumber: Data Primer, 2021.

Gambar 4. Sosialisasi Pra-Konstruksi Program Rutilahu

2. Tahapan Aktualisasi

Rancangan aktualisasi adalah sebuah proses perencanaan yang strategis. Robert N Anthony dalam (Matippanna, 2020) merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan setiap tahunnya. Aktualisasi yang baik harus berawal dari sebuah issue strategis yang memiliki urgensi dalam penanganannya. Issue strategis tersebut merupakan kunci dari sebuah penanganan yang strategis. Dalam hal ini metode aktualisasi yang digunakan selain sosialisasi adalah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat seperti urun dana, urun tenggang, urun konsumsi dan urun bahan bangunan.

3. Tahapan Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur dan mengetahui sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah sebuah aktivitas investigasi yang sistematis mengenai suatu objek yang bernilai atau berharga (Muryadi, 2017). Evaluasi bertujuan untuk membandingkan apa yang seharusnya dicapai dan belum tercapai. Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini di antaranya dengan melakukan kontrol lapangan, melihat kesesuaian anatara yang dikerjakan dengan tenggat waktu, serta memantau dan mencatat berapa biaya yang sudah dikeluarkan.

Dalam mengevaluasi suatu program, tidak hanya dilaksanakan pada akhir program, melainkan sejak awal pelaksanaan evaluasi sudah boleh dilakukan. Mulai dari tahap penyusunan program hingga hasil daripada program tersebut (Muryadi, 2017). Keberhasilan suatu evaluasi secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan model evaluasi yang tepat, melainkan banyak faktor dan indikator lainnya.

Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode CARL (*Capability, Assessibility, Readiness, Leverage*). *Capability* adalah kemampuan SDA, SDM, dan lainnya. *Assessibility* adalah tingkat kemudahan dalam mengatasi permasalahan. *Readiness* adalah kesiapan SDA, SDM, motivasi, kompetensi, serta kesiapan masyarakat. Sedangkan *Leverage* adalah pengaruh antar masalah atau masalah satu dengan yang lainnya. Jamil (2007) menjelaskan bahwa metode ini dapat digunakan dalam menentukan prioritas masalah apabila data yang tersedia merupakan data kualitatif dengan menentukan skor atas kriteria tertentu.

Metode CARL ini digunakan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelesaian suatu masalah, metode ini menekankan pada kapabilitas atau kemampuan pelaksana program dalam mengatasi hambatan keterbatasan menyelesaikan masalah (Tyas, 2020). Tahapannya adalah dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat tabel kriteria dan diisi skornya dan yang terakhir menentukan prioritas.

Metode CARL dalam penelitian ini dirasa metode yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini. Karena, dalam melaksanakan suatu program kesiapan dari penyelenggara perlu diperhatikan. Baik dari kapabilitas, sarana dan prasarana, regulasi dan hal-hal lain yang mendukung keberhasilan suatu program dirasa perlu diperhatikan.

Dalam hal ini *capability* mencakup ketersediaan sumber daya, baik itu dana dan sarana/peralatan. *Assessibility* yang dimaksud adalah kemudahan dalam mengatasi masalah yang didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau juklak. *Readiness* yang mencakup kesiapan dari tenaga pelaksana maupun sasaran, seperti kemampuan dan motivasi. Dan *leverage* yang menerangkan seberapa besar pengaruh kriteria satu dengan yang lain dalam pemecahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program RS-Rutilahu (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon. Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi apa saja permasalahan dan kendala yang ada pada proses penyelenggaraan program RS- Rutilahu. Lebih jelasnya, tabel di bawah ini merinci masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada pelaksanaan program RS-Rutilahu di Kota Cirebon.

Tabel 1. Identifikasi Masalah

No	Data Permasalahan
1	Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang disiapkan

2	Syarat administrasi dan kriteria kelayakan bangunan yang harus dipenuhi
3	Tahapan Pelaksanaan kegiatan yang harus diikuti
4	Kesadaran penerima manfaat untuk berswadaya dalam perbaikan rumahnya
5	Nilai bantuan yang terbatas sesuai dengan ketentuan perbaikan rumah MBR ukuran 36 m ²
6	Konstruksi yang dibangun tidak mengikuti kriteria rumah tidak layak huni
7	Bahan yang digunakan tidak menggunakan standar SNI yang ditetapkan
8	Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka, transparan dan intensif
9	Monev internal dan external belum optimal
10	Banyak perubahan format baik untuk proposal pencairan atau LPJ sehingga membuat pengumpulannya menjadi terlambat

Sumber: Data Primer, 2022.

Di bawah ini merupakan hasil perhitungan menggunakan metode CARL atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun keterangan angka dalam pengisian nilai CARL adalah:

5 = sangat penting

4 = penting

3 = cukup penting

2 = kurang penting

1 = tidak penting.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Angka CARL

No	Data Permasalahan	C	A	R	L	Total Nilai CXAXRXL
1	Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang disiapkan	5	5	3	2	150
2	Syarat administrasi dan kriteria kelayakan bangunan yang harus dipenuhi	5	2	3	2	60
3	Tahapan Pelaksanaan kegiatan yang harus diikuti	5	2	5	3	150
4	Kesadaran penerima manfaat untuk berswadaya dalam perbaikan rumahnya	3	3	2	2	36
5	Nilai bantuan yang terbatas sesuai dengan ketentuan perbaikan rumah MBR ukuran 36 m ²	3	3	3	3	81
6	Konstruksi yang dibangun tidak mengikuti kriteria rumah tidak layak huni	2	5	3	2	60
7	Bahan yang digunakan tidak menggunakan standar SNI yang ditetapkan	2	3	3	5	90

No	Data Permasalahan	C	A	R	L	Total Nilai CXAXRXL
8	Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka,transparan dan intensif	5	5	5	5	625
9	Monev internal dan external belum optimal	3	5	5	3	225
10	Banyak perubahan format baik untuk proposal pencairan atau LPJ sehingga membuat pengumpulannya menjadi terlambat	2	2	2	2	16

Sumber: Data Primer, 2022.

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa, total nilai perhitungan CARL terbesar ada pada “Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka, transparan dan intensif” dengan total nilai 625. Kemudian pada urutan kedua “Monev internal dan eksternal belum optimal” dengan total nilai 225. dan pada urutan ketiga “Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang disiapkan” dengan bobot nilai 150. Ketiga permasalahan ini yang menjadi *urgent* atau prioritas dalam penyelesaiannya,

Sedangkan permasalahan yang memiliki bobot nilai terendah adalah “Banyak perubahan format baik untuk proposal pencairan atau LPJ sehingga membuat pengumpulannya menjadi terlambat” poin ini memiliki bobot nilai sebesar 16, paling kecil di antara yang lainnya. Artinya ini tidak menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan program RS-Rutilahu di Kota Cirebon.

Tabel 3. Urutan Prioritas Permasalahan

No	Permasalahan	Prioritas Masalah
1	Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang disiapkan	3
2	Syarat administrasi dan kriteria kelayakan bangunan yang harus dipenuhi	7
3	Tahapan Pelaksanaan kegiatan yang harus diikuti	4
4	Kesadaran penerima manfaat untuk berswadaya dalam perbaikan rumahnya	9
5	Nilai bantuan yang terbatas sesuai dengan ketentuan perbaikan rumah MBR ukuran 36 m ²	6
6	Konstruksi yang dibangun tidak mengikuti kriteria rumah tidak layak huni	8
7	Bahan yang digunakan tidak menggunakan standar SNI yang ditetapkan	5
8	Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka,transparan dan intensif	1
9	Monev internal dan external belum optimal	2
10	Banyak perubahan format baik untuk proposal pencairan atau LPJ sehingga membuat pengumpulannya menjadi terlambat	10

Sumber: Data Primer, 2022.

Setelah diberi penilaian, maka didapatkan urutan prioritas masalah yang terlebih dahulu harus diselesaikan, lebih jelasnya dapat melihat tabel di atas.

Dari urutan permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan sumber masalah utama sekaligus perbaikan komunikasi antara elemen terutama menyangkut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penerima manfaat harus berjalan harmonis dan intens. Sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa komunikasi menjadi unsur yang penting dan perlu diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan (Syarif et al., 2014). Cook & Hunsaker (2007) juga menerangkan tujuan komunikasi adalah untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Oleh karenanya, tujuan organisasi dapat tercapai apabila dalam suatu organisasi terdapat komunikasi yang efektif dan efisien.

Pada Urutan Prioritas masalah yang kedua yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Membangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang baik akan memperlancar dan menjaga pelaksanaan kualitas pekerjaan. Monitoring dalam suatu pekerjaan menjadi media pengawasan dan control terhadap Langkah dan sistematika pekerjaan yang dilakukan sementara evaluasi akan menjalankan fungsi “perbaikan” Ketika pada saat monitoring ditemukan hal yang tidak patut dalam pelaksanaan pekerjaan. Pentingnya monev juga dijelaskan oleh Suparno dan Luluk Asmawati (2019) dalam penelitiannya, bahwa monitoring memiliki peranan penting untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan suatu program yang akan dilaksanakan, seperti alat, waktu, anggaran dan personel. Mardikanto (2009) menjelaskan bahwa evaluasi menjadi penting untuk menilai keadaan suatu objek.

Prioritas masalah yang mendapatkan Prioritas harus diselesaikan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dan Perbandingan jumlah usulan dengan realisasi bantuan yang turun menjadi Prioritas yang juga harus segera menjadi Prioritas yang harus diselesaikan. Tahapan pelaksanaan meliputi y=tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaa hingga monitoring dan evaluasi harus dijalankan dengan *range* waktu yang tepat dan tidak boleh terlalu “molor”. Efisiensi dan efektifitas merupakan sebuah syarat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ini juga dijelaskan oleh Mardiasmo (2009) yang menyebutkan bahwa suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efektif suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhirnya. Dalam (Pangkey & Pinatik, 2015) dijelaskan bahwa efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas.

Selain efisiensi dan efektifitas, produktivitas juga menjadi ukuran kinerja. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara nilai barang yang dihasilkan dari suatu aktivitas produksi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut dalam suatu periode

tertentu (Al Parisi, 2017). Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dalam ukuran kinerjanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: urutan prioritas masalah pada program RS Rutilahu yang diselenggarakan oleh DPRKP Kota Cirebon adalah; (1) Komunikasi antara BKM dan penerima manfaat belum terbuka, transparan dan intensif, (2) Monev (Monitoring dan Evaluasi) internal dan eksternal belum optimal, dan (3) Banyaknya jumlah usulan penerima manfaat tidak sebanding dengan jumlah kuota bantuan yang disiapkan.

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan di antaranya; menjalin komunikasi yang intens dan terbuka antara BKM dengan penerima manfaat. Kemudian mengoptimalkan monitoring dan evaluasi baik itu secara internal maupun eksternal. Dengan banyaknya jumlah Rutilahu yang tidak sebanding dengan jumlah kuota, maka perlu menambah jumlah kuota bantuan program RS-Rutilahu di Kota Cirebon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon dan juga kepada Koordinator Fasilitator Program Rutilahu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Parisi, S. (2017). Tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 63-72.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021. In *Berita Resmi Statistik* (Vol. 01, Issue 07).
- Bakhri, S., Bambang, & Fauzi, P. (2021). Significant Role of Economic Growth in Alleviating Poverty. *Proceedings of the 1st Paris Van Java International Seminar on Health, Economics, Social Science and Humanities (PVJ-ISHESSH 2020)*, 535, 504–507. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210304.114>
- BPS. (2016). *Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik.
- Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing Affordability: Beyond the Income and Price Terms, using China as a Case Study. *Habitat International*, 47, 169–175.
- Cook Curtins W & Hunsaker Philip. (2007). *Management and Organizational Behaviour*. McGraw-Hill Education.
- Dea. (2021). *630 Unit Rumah Siap Dilakukan Renovasi di Tahun 2021*. Sekertariat Daerah Kota Cirebon. <https://setda.cirebonkota.go.id/2021/02/630-unit-rumah-siap-dilakukan-renovasi->

di-tahun-2021/

- DPRKP. (2022). *Data Aktualisasi Rutilahu Tahun 2021 Kota Cirebon*.
- Jamil dan dr. Nur Aisyah, M. S. (2007). Pengambilan Keputusan. *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia*.
- Jayadi, D. . and A. G. B. (2016). Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia. *MODUS*, 28(1).
- Juanda, Y. P. and B. (2018). Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan Dengan Pendekatan Observasional. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1).
- Kemensos. (2021a). *Melalui Bansos RS Rutilahu, Penerima Bantuan Mendapatkan Rumah Layak Huni*. Kementrian Sosial RI. <https://kemensos.go.id/melalui-bansos-rs-rutilahu-penerima-bantuan-mendapatkan-rumah-layak-huni>
- Kemensos. (2021b). *Rekapitulasi Program BSPS*. <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/>
- M. Puspitasari, V. Nurmalasari, and A. S. (2011). Investigating Economic Growth Impact on Poverty Reduction in East Java : Does Spatial Matter ? *Majalah Ekonomi*, 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardikanto, T. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Universitas Sebelas Maret.
- Matippanna, A. (2020). Rancangan Aktualisasi Yang Inovatif, Efektif dan Sustainable pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 1(1), 111–122.
- Muryadi, A. D. (2017). MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 03(1).
- Ningrum, S. . (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2).
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Suparno, & Asmawati, L. (2019). Monitoring Dan Evaluasi Untuk Peningkatan Layanan Akademik Dan Kinerja Dosen Program Studi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 88–97.
- Susanto, I. (2019). *Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu)*. Kemensos RI. <https://kemensos.go.id/rutilahu>
- Syarif, A., Unde, A. A., & Asrul, L. (2014). Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(3), 142–152. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/583>

- Tyas, R. C. (2020). Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan dan Jenis Intervensi di Rw 13 dan Rw 14 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya Tahun 2018 Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan dan Jenis Intervensi di Rw 13 Dan Rw 14 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 18(1), 10–13. <https://doi.org/10.35882/jpk.v18i1.2>
- Udiati, T. Y. T. dan T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka the Impact of Household Not Worth Hundred for the Social Welfare of Beneficiary Families in Bangka Regensi. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973>